

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Agensi

“Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Putranto (2018), hubungan keagenan merupakan kontrak dimana para pemegang saham (*principal*) memberikan wewenang kepada pihak manajemen (*agent*) untuk melakukan suatu pekerjaan sekaligus mengambil keputusan.” “Dalam opini *audit going concern*, agen bertugas menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manajemen yang nantinya akan menunjukkan kondisi perusahaan” (Effendi, 2019). “Menurut Putranto (2018) hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah antara pemegang saham dan manajer. Masalah yang terjadi antara kedua belah pihak bersifat individual atau kepentingan pribadi, baik pemegang saham maupun manajer memiliki kepentingan berbeda yang masing-masing menginginkan agar tujuannya dapat terpenuhi. Konflik tersebut dikhawatirkan dapat memicu timbulnya kecurangan dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan sehingga penyajian laporan keuanganpun dapat dimanipulasi.”

“Menurut Widyantari (2011) dalam Kusumayanti dan Widhiyani (2017), hubungan antara *principals* dan *agent* menimbulkan dua permasalahan yaitu:

1) *Asimetry Information*

Informasi yang diketahui oleh manajer lebih banyak dibandingkan dengan pemilik perusahaan mengenai laporan keuangan serta operasi perusahaan.

2) Terjadinya konflik kepentingan di antara pemilik dan manajer

Tujuan di antara mereka terkadang tidak sejalan dan manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemilik”

“Menurut Scott (2000) dalam Grediani dan Niandari (2017), asimetri informasi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- 1) *Adverse selection*, yakni bahwa manajer serta orang-orang dalam perusahaan lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor atau pihak luar lainnya. Fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil investor tidak disampaikan informasinya oleh manajemen.
- 2) *Moral hazard*, yakni bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun kreditur sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar sepengetahuan pemegang saham dan kreditur yang sebenarnya melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak dilakukan.”

Adanya masalah yang dapat terjadi di antara kedua pihak tersebut, maka “peran auditor independen sangat dibutuhkan untuk mensimetrikkan informasi antara kedua pihak” (Syahputra dan Yahya, 2017). Selain itu, menurut Astuti (2012) dalam Effendi (2019), menyebutkan bahwa “auditor mempunyai tugas dalam memberikan jasa untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan, dengan hasil akhirnya adalah opini audit. Opini audit yang dikeluarkan auditor ini haruslah yang berkualitas yang ditunjukkan dengan semakin objektif dan transparannya informasi keuangan perusahaan.”

## **2.2 Laporan Keuangan**

“Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang penyajian laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- 1) Aset
- 2) Liabilitas
- 3) Ekuitas
- 4) Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian
- 5) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik kapasitasnya sebagai pemilik
- 6) Arus kas”

“Menurut PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021), komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode
- 4) Laporan arus kas selama periode
- 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
- 6) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya
- 7) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan”

“Menurut PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021), karakteristik kualitatif laporan keuangan di antaranya adalah:

- 1) Relevan  
Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

## 2) Andal

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

## 3) Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

## 4) Mudah dipahami

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.”

“Menurut Weygant, *et al.* (2019), terdapat 2 pengguna informasi keuangan, yaitu:

### 1) *Internal Users* (Pengguna Internal)

Pengguna internal informasi akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengorganisasi, dan menjalankan bisnis, termasuk para manajer pemasaran, *supervisor* produksi, direktur keuangan dan *staff* perusahaan.

### 2) *External Users* (Pengguna Eksternal)

Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan. Umumnya, pengguna eksternal ini adalah investor dan kreditor. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan untuk membeli, mempertahankan, atau menjual saham kepemilikan sebuah perusahaan sedangkan kreditor menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi resiko pemberian kredit atau pinjaman uang.”

“Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, laporan tahunan adalah laporan

pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Laporan tahunan wajib paling sedikit memuat:

- 1) Ikhtisar data keuangan penting
- 2) Informasi saham (jika ada)
- 3) Laporan Direksi
- 4) Laporan Dewan Komisaris
- 5) Profil Emiten atau Perusahaan Publik
- 6) Analisis dan pembahasan manajemen
- 7) Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik
- 8) Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik
- 9) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
- 10) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.”

### **2.3 Audit**

Elder, Randal J *et al.*, (2019), menyatakan “*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*” Jika diartikan, “audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan pada tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan.” Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. “Menurut Elder, Randal J. *et al.*, (2019), terdapat 3 klasifikasi tujuan audit apabila dibagi berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh auditor, yaitu:

1) Terkait Transaksi

- a) *Occurrence* adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama proses akuntansi.
- b) *Completeness* adalah asersi yang menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah disertakan seluruhnya.
- c) *Accuracy* adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar.
- d) *Classification* adalah asersi yang memastikan apakah transaksi yang terjadi telah dicatat dalam akun yang sesuai.
- e) *Cut-Off* adalah asersi yang memastikan apakah transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat.

2) Terkait Saldo

- a) *Existence* adalah asersi yang digunakan untuk memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang tercatat dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut.
- b) *Completeness* adalah asersi yang memastikan apakah semua akun dan jumlah yang harus disajikan dalam laporan keuangan disertakan seluruhnya.
- c) *Valuation and Allocation* adalah asersi yang memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan pada laporan keuangan pada jumlah yang tepat termasuk penyesuaian nilai yang mencerminkan jumlah aset pada nilai wajar atau nilai realisasi bersih.
- d) *Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan apakah aset dan liabilitas yang tercatat merupakan hak dan kewajiban entitas pada tanggal tersebut.

3) Terkait Pengungkapan

- a) *Occurrence and Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan apakah peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas.
- b) *Completeness* adalah asersi yang memastikan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan.

c) *Accuracy and Valuation* adalah asersi yang memastikan apakah informasi keuangan yang diungkapkan sudah benar dan pada jumlah yang tepat.”

Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh kualitas dan jumlah bukti yang memadai. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan dan mengevaluasi informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. “Menurut Elder, Randal J. *et al.*, (2019) bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan informasi yang sedang diaudit yang dinyatakan dengan kriteria yang ditetapkan.” “Menurut SA 500 mengenai bukti audit, terdapat 7 jenis bukti audit, yaitu:

1) Inspeksi

Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset.

2) Observasi

Observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Observasi memberikan bukti audit tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan dan fakta bahwa adanya observasi atas aktivitas tersebut dapat memengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.

3) Konfirmasi eksternal

Merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain.

4) Penghitungan ulang

Penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.

5) Pelaksanaan kembali

Pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas.

6) Prosedur analitis

Terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi antara satu informasi dengan informasi lainnya atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya.

7) Permintaan keterangan

Terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non keuangan, di dalam atau di luar entitas. Permintaan keterangan digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya.”

Bukti audit yang diperoleh harus dapat dipercaya atau diandalkan untuk membantu meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar. “Menurut Elder, Randal J. *et al.*, (2019), terdapat enam karakteristik reliabilitas bukti audit, yaitu:

1) Independensi penyedia bukti

Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal lebih dapat diandalkan daripada yang diperoleh dari pihak internal. Komunikasi dari bank, pengacara atau pelanggan pada umumnya dianggap lebih dapat diandalkan daripada jawaban yang diperoleh dari klien.

2) Efektivitas pengendalian intern klien

Bila *control internal* klien efektif, bukti yang yang diperoleh lebih dapat diandalkan daripada bila tidak efektif.

3) Pengetahuan langsung auditor

Bukti yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, penghitungan ulang dan pemeriksaan lebih dapat diandalkan daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung.

4) Kualifikasi individu yang menyediakan informasi

Meskipun sumber informasinya independen, bukti tidak akan dapat diandalkan kecuali, individu yang mempergunakannya dianggap cocok. Selain itu, bukti yang diperoleh langsung oleh auditor tidak memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi bukti.

5) Tingkat objektivitas

Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan daripada bukti yang membutuhkan pertimbangan yang cukup untuk menentukan kebenarannya.

6) Ketepatan waktu

Bukti biasanya lebih dapat diandalkan apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal pada neraca.”

“Adapun prosedur untuk memperoleh bukti audit sesuai yang diatur dalam SA 500 adalah sebagai berikut:

1) Prosedur penilaian risiko, yang mencakup permintaan keterangan dari manajemen dan personel lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan, prosedur analitis, dan observasi dan inspeksi (SA 315, IAPI, 2021)

2) Prosedur audit lanjutan, yang terdiri atas pengujian pengendalian, ketika disyaratkan oleh SA atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut dan prosedur *substantive*, termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis *substantive*”

“Menurut Elder, Randal J *et al.*, (2019), terdapat 3 jenis audit, yaitu:

1) Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian prosedur dan metode organisasi. Pada penyelesaian audit operasional, manajemen biasanya mengharuskan rekomendasi untuk meningkatkan operasi.

2) Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan *auditee* untuk mengikuti prosedur, aturan atau peraturan spesifik yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

### 3) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit keuangan dilakukan untuk menentukan laporan keuangan (informasi yang telah diverifikasi) dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.”

“Menurut Elder, Randal J *et al.*, (2019), proses audit terdiri dari empat tahap yaitu:

#### 1) Merencanakan dan mendesain pendekatan audit

Hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah perancangan rencana awal, pemahaman bisnis klien, mengestimasi risiko bisnis klien, pelaksanaan prosedur analitis awal, penetapan materialitas, risiko audit dan risiko inheren, serta pemahaman pengendalian internal dan pengumpulan informasi.

#### 2) Melaksanakan uji pengendalian dan keterjadian transaksi

Tahap ini dilakukan untuk mengurangi risiko pengendalian (*control risk*). Auditor akan melakukan evaluasi terhadap pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah transaksi (*substantive test of transaction*).

#### 3) Melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait dengan keterjadian transaksi dan mengetahui apabila terdapat salah saji material dalam saldo laporan keuangan.

#### 4) Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit

Auditor mengumpulkan temuan audit, mengevaluasi hasil, dan mengeluarkan opini audit.”

“Menurut Elder, Randal J. *et al.*, (2019), terdapat 4 komponen dalam risiko audit:

#### 1) *Planned Detection Risk* (Risiko Deteksi yang Direncanakan)

Risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat ditoleransi.

#### 2) *Inherent Risk* (Risiko Inheren)

Risiko inheren mengukur penilaian atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam segmen, sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal.

### 3) *Control Risk* (Risiko Pengendalian)

Risiko kontrol mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam suatu segmen akan dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien.

### 4) *Acceptable Audit Risk* (Risiko Audit yang Dapat Diterima)

Risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan.”

## 2.4 Opini Audit

“Menurut SA 700 mengenai perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan (IAPI, 2021), tujuan auditor adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini tersebut.”

“Berdasarkan SA 700, terdapat bentuk baku penyajian laporan audit, yaitu:

- 1) Judul, mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen.
- 2) Pihak yang dituju, laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan.
- 3) Paragraf pendahuluan, mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.
- 4) Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan

keuangan. Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan yang mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

- 5) Tanggung jawab auditor, untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa auditor meyakini bahwa bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor sudah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini auditor.
- 6) Opini auditor, menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit.
- 7) Tanggung jawab pelaporan lainnya, merupakan tambahan tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan.
- 8) Tanda tangan auditor.
- 9) Tanggal laporan audit, tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan.
- 10) Alamat auditor, harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik.”

“Menurut SA 700, terdapat 2 bentuk opini audit, yaitu opini tanpa modifikasian dan opini modifikasian. Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini tanpa modifikasian ini terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian dan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas yang diberikan ketika auditor yakin bahwa informasi tambahan itu penting/diperlukan (Elder, Randal J. *et al.*, 2019.) Jika auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan

secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor.”

“Menurut SA 705 mengenai modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, opini modifikasian terbagi menjadi 3 tipe yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.”

**Tabel 2.1 Tipe Opini Modifikasian**

Sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasi opini	Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan	
	Material tetapi tidak pervasif	Material dan pervasif
Laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak wajar
Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak menyatakan pendapat

Sumber: Institut Akuntan Publik Indonesia: SA 705 (2021)

Berdasarkan Tabel 2.1, “tiga bentuk opini modifikasi, yaitu:

1. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif.

Pervasif adalah suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, jika ada, yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti

audit yang cukup dan tepat. Dampak yang pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang menurut pertimbangan auditor tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan (SA 700, 2021).

2. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.”

“Menurut SA 706 (IAPI, 2021) ketika menurut auditor perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan, auditor dapat mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain. Ketika auditor mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporannya, auditor harus:

- 1) Meletakkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan auditor.
- 2) Menggunakan judul “Penekanan Suatu Hal” atau judul lain yang tepat.

- 3) Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan.
- 4) Mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut.”

“Terdapat beberapa kondisi saat auditor perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal yaitu:

- 1) Suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator.
  - 2) Penerapan dini (jika diizinkan) atas suatu standar akuntansi baru yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya.
- Suatu bencana alam besar yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas.”

## **2.5 Opini Audit *Going Concern***

“Menurut Abadi *et al.* (2019), *Going concern audit opinion is a modified audit opinion that is under the auditor's judgment there is a significant inability or uncertainty towards the survival of a company in carrying out its operations, within a reasonable time or not more than one year from the date of the audited financial statements*”. Jika diartikan, “opini audit *going concern* adalah opini audit yang dimodifikasi atas penilaian ketidakmampuan atau ketidakpastian yang signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam melaksanakan operasinya dalam waktu yang wajar atau tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan diaudit.” “Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya” (SA 570, 2021).

“Auditor harus melakukan prosedur penilaian risiko untuk mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya” (SA 570, 2021).

“Menurut IAPI (2021) dalam SA 570, auditor diberikan pedoman dalam memberikan opini audit sehubungan dengan masalah going concern perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan:
  - a) Menjelaskan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut;
  - b) Mengungkapkan secara jelas ketidakpastian material tersebut dan oleh karena itu entitas kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal.
- 2) Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasi dan mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor untuk:
  - a) Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya:
  - b) Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam poin 1.
- 3) Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya.

- 4) Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, namun menurut auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha tersebut tidak tepat, maka auditor menyatakan suatu opini tidak wajar.
- 5) Jika auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk memperluas penilaiannya dan manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor sesuai dengan kondisinya.”

“Peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha menurut SA 570 (IAPI, 2021) adalah:

1) Keuangan

- a) Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih
- b) Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka Panjang
- c) Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor
- d) Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif
- e) Rasio keuangan utama yang buruk
- f) Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas
- g) Dividen yang sudah lama tertunggak atau yang tidak berkelanjutan
- h) Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo
- i) Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman
- j) Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman
- k) Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya

2) Operasi

- a) Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya
  - b) Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian
  - c) Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, wara laba, lisensi, atau pemasok utama
  - d) Kesulitan tenaga kerja
  - e) Kekurangan penyediaan barang/bahan
  - f) Munculnya kompetitor yang sangat berhasil
- 3) Lain-lain
- a) Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya
  - b) Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas
  - c) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas
  - d) Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan

Pengevaluasian atas rencana manajemen terkait tindakan di masa depan dapat mencakup meminta keterangan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk, sebagai contoh, rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan.”

“Variabel opini audit *going concern* ini diukur dengan menggunakan skala *dummy*. Kode 0 diberikan apabila perusahaan tidak menerima opini audit *going concern* (NGC) dan kode 1 diberikan apabila perusahaan menerima opini audit *going concern* (GC)” (Minerva *et al.*, 2020).

## 2.6 Likuiditas

“Menurut Weygant, *et al.* (2019), rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang

jatuh tempo.” “Menurut Kurniawati dan Murti (2017), perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid”. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik adalah perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.”

“Menurut Weygant, *et al.* (2018), rasio likuiditas terdiri atas 3 jenis, yaitu:

1) *Current Ratio*

Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan liabilitas lancar.

2) *Acid-Test (Quick) Ratio*

Menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar berupa kas, investasi jangka pendek, dan piutang. Rasio ini dihitung dengan cara menambahkan kas, investasi jangka pendek, dan piutang, kemudian dibagi dengan liabilitas lancar.

3) *Current Cash Debt Coverage*

Mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban saat ini dalam satu tahun tertentu dari operasinya.”

Dalam penelitian ini, rasio likuiditas diukur dengan menggunakan *Current Ratio (CR)*. “Menurut Weygant *et al.*, (2019), *CR* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

*CR* = *Current Ratio*

*Current Assets* = Total aset lancar

*Current Liabilities* = Total utang jangka pendek”

“Menurut Weygandt, *et al.* (2019), perusahaan dan analis memandang sebuah *current ratio* dengan perbandingan 2:1 sebagai standar untuk peringkat kredit yang baik. *Current assets* adalah aset yang diperkirakan perusahaan akan diubah menjadi

kas atau digunakan kurang atau selama satu tahun atau selama operasi perusahaan. Berikut yang termasuk dalam *current assets* beserta contoh jurnalnya:

1) Kas

Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari koin, mata uang, cek, wesel, dan kas di tangan atau deposito di Bank atau penyimpanan serupa lainnya.

<i>Cash</i>	xxx	
<i>Service revenue</i>		xxx

2) Investasi jangka pendek

Investasi yang siap untuk dipasarkan dan dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun atau siklus operasinya, dengan melihat yang lebih lama.

<i>Share investment</i>	xxx	
<i>Cash</i>		xxx

3) Piutang

Jumlah yang terutang oleh pelanggan akibat transaksi yang terjadi secara kredit.

<i>Account Receivable</i>	xxx	
<i>Service revenue</i>		xxx

4) Persediaan

Aset berupa barang/perlengkapan lainnya yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

<i>Supplies</i>	xxx	
<i>Cash</i>		xxx

5) Beban dibayar di muka.

Pengeluaran yang dibayar secara tunai sebelum digunakan/dikonsumsi.”

<i>Prepaid expense</i>	xxx	
<i>Cash</i>		xxx

“Menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, aset lancar merupakan aset perusahaan yang dimiliki untuk diperdagangkan, memiliki intensi untuk dijual atau digunakan dalam satu siklus operasi normal, dapat berupa kas dan setara kas yang penggunaannya

minimal dua belas bulan setelah periode pelaporan, serta diperkirakan akan direalisasikan dalam periode dua belas bulan setelah periode pelaporan.” “Menurut IAI (2021), entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- 1) Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- 2) Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- 3) Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- 4) Kas atau setara kas, kecuali dibatasi sehingga tidak akan dipertukarkan atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.”

“Menurut Weygandt, *et al.* (2019), *current liabilities* adalah utang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Dicatat sebagai *current liabilities* jika memenuhi salah satu dari dua kondisi:

- (1) Kewajiban diperkirakan akan diselesaikan selama siklus operasi normal; atau
- (2) Kewajiban diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pencatatan.”

“Menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- 1) Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
- 2) Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
- 3) Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- 4) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggihkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.”

“Menurut Weygandt, *et al.* (2019), jenis-jenis utang lancar adalah:

1) *Account Payable* (Utang Usaha)

Akun utang usaha adalah saldo yang terutang kepada pihak lain terkait dengan barang dagang, persediaan, atau jasa yang dibeli tanpa dilakukan pembayaran. Akun utang usaha timbul karena adanya jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dengan waktu pembayarannya.

2) *Notes Payable* (Utang Wesel)

Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Utang wesel timbul dari pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Utang wesel yang terdapat pada kewajiban lancar diklasifikasikan dalam utang wesel jangka pendek.

3) *Current maturities of long-term debt* (Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun)

Bagian dari obligasi, wesel hipotik, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo saat ini tidak boleh dicatat sebagai kewajiban lancar jika: diselesaikan dengan menggunakan aset tetap, didanai kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan utang baru yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan dikonversi menjadi saham biasa.

4) *Short-term obligations expected to be refinanced* (Kewajiban Jangka Pendek yang diharapkan untuk Dibiayai Kembali)

Kewajiban jangka pendek harus dikeluarkan dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi, yaitu: memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang, dan harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5) *Dividend payable* (Utang Dividen)

Utang dividen adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil otorisasi dewan direksi.

6) *Customer advances and deposits* (Uang Muka dan Deposit)

Kewajiban lancar dapat mencakup setoran tunai yang dikembalikan dan diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja suatu kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban yang akan datang.

7) *Unearned revenues* (Pendapatan diterima di Muka)

Pembayaran yang diterima sebelum barang dikirimkan atau jasa telah dilakukan.

8) *Sales and value-added taxes payable* (Utang Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak konsumsi umumnya berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai. Perusahaan harus mengumpulkan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai dari pelanggan atau transfer properti pribadi berwujud dan atas jasa-jasa tertentu yang kemudian diserahkan kepada pemerintah.

9) *Income taxes payable* (Utang Pajak Penghasilan)

Pajak penghasilan dalam siklus normal operasi perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

10) *Employee-related liabilities* (Utang Karyawan)

Jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah yang dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang berhubungan dengan kompensasi karyawan juga termasuk pemotong gaji, absensi yang dikompensasi, dan bonus.”

## **2.7 Pengaruh Likuiditas terhadap Opini Audit Going Concern**

“Menurut Rahmawati, Wahyuningsih, dan Setiawati (2018), semakin kecil nilai *current ratio* menunjukkan perusahaan kurang likuid sehingga dapat diasumsikan bahwa perusahaan akan kesulitan memenuhi kewajiban kepada para kreditornya, pada posisi seperti ini kemungkinan besar auditor akan memberikan opini audit *going concern*.” “Berdasarkan SA 570, salah satu indikator yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan

usaha adalah ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.” Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil rasio *CR*, maka semakin besar kemungkinan auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Zulaikha (2019) menemukan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putranto (2018) menemukan bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Wahyuningsih, dan Setiawati (2018) menemukan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penjelasan mengenai rasio likuiditas yang diukur dengan *CR* dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**“Ha<sub>1</sub>: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.”**

## 2.8 Solvabilitas

“Menurut Weygant, *et al.* (2019), *Solvency ratios measure the ability of a company to survive over a long period of time.*” Jika diartikan, “rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang panjang.”

“Menurut Haryanto dan Sudarno (2019), solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang.” Dapat disimpulkan, rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu panjang dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

“Menurut Weygant, *et al.* (2019), rasio solvabilitas terdiri atas 2 jenis, yaitu:

### 1) *Debt to Asset Ratio*

“*The debt to assets ratio measures the percentage of the total assets that creditors provide.*” Jika diartikan, rasio utang terhadap aset mengukur persentase dari total aset yang diberikan kreditor.

## 2) *Time Interest Earned*

“*Times interest earned provides an indication of the company’s ability to meet interest payments as they come due.*” Jika diartikan, *times interest earned* memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo.”

“Menurut Palepu *et al.*, (2019) rasio *debt and long-term solvency*, terdiri atas 3 jenis, yaitu:

### 1) *Debt to Equity Ratio*

“*Provides an indication of how many euros of debt as a proportion of total capital.*”

Jika diartikan, *debt to equity ratio* memberikan indikasi banyaknya euro (rupiah dalam penelitian ini) sebagai proporsi dari total modal.

### 2) *Interest Coverage*

“*Indicates the euros of earnings available for each euro of required interest payment.*” Jika diartikan, *interest coverage* menunjukkan pendapatan dalam satuan euro (rupiah dalam penelitian ini) yang tersedia dari pembayaran bunga yang diperlukan.

### 3) *Debt Coverage*

“*Measure a firm’s ability to measure all fixed financial obligations, such as interest payments, lease, payments, and debt payments.*” Jika diartikan, *debt coverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengukur kewajiban keuangan tetap, seperti pembayaran bunga, pembayaran sewa, dan pembayaran utang.”

Dalam penelitian ini, rasio solvabilitas diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. “Menurut Avivah (2018), *DER* merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan.” “Menurut Palepu *et al.*, (2019), *DER* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Shareholders' equity}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

*DER* = *Debt to Equity Ratio*

*Total liabilities* = Total liabilitas

*Shareholders' equity* = Total ekuitas”

“Auditor akan melihat sisi ini bagaimana pendanaan perusahaan lebih banyak dari utang atau modal. Utang didapat dari kreditor, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek. Jika perusahaan meminjam dana pada kreditor maka perusahaan memiliki kewajiban untuk melunasi utang tersebut. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka kewajiban perusahaan untuk mengembalikan dana juga semakin tinggi dan perusahaan harus melunasi utang. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghasilkan laba untuk membayar utang sedangkan beban operasional tetap berjalan, tingginya tingkat utang menyebabkan kesangsian kelangsungan hidup perusahaan” (Sudarno, 2019). “Menurut Hery (2019), jika perusahaan memilih pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan, kelebihan adalah terletak pada kemungkinan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang relatif lebih besar, kreditor tidak memiliki hak suara seperti halnya pemegang saham biasa sehingga pemilik perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan, beban bunga yang dibayarkan dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, serta dapat menghasilkan laba per saham biasa yang lebih besar sedangkan kekurangannya adalah terletak pada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, dan memerlukan pembayaran angsuran, bunga, maupun biaya lainnya (biaya administrasi, provisi, dan komisi. Sedangkan apabila perusahaan memilih sumber pembiayaan melalui modal, memiliki kelebihan, yaitu kemudahan dalam mendapatkan dana, tidak dibatasi oleh berbagai aturan (ketentuan) atau persyaratan waktu pengembalian dana yang tidak terbatas dan tidak ada beban untuk membayar angsuran, bunga, maupun biaya lainnya. Kekurangannya adalah terletak pada jumlahnya yang terbatas karena mengandalkan pada modal pribadi pemilik, terutama apabila dana yang dibutuhkan cukup besar.”

“Menurut IAI (2018), liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Total liabilitas dibagi menjadi liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Liabilitas lancar adalah utang yang memiliki jatuh tempo dalam waktu satu tahun.” “Yang biasanya termasuk dalam liabilitas lancar adalah utang usaha, utang pajak, dan utang lainnya seperti utang wesel jangka pendek dan utang gaji (Harrison *et al.*, 2018).” “Menurut Harrison *et al.* (2018), liabilitas tidak lancar adalah kewajiban yang cenderung membutuhkan arus keluar atas manfaat ekonomi setelah jangka waktu 1 tahun.” “Menurut Weygandt *et al.* (2019), jenis-jenis utang tidak lancar adalah:

1) *Bonds payable* (Obligasi)

Obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan ditambah bunga berkala pada tingkat yang ditentukan.

Jenis obligasi yang biasa diterbitkan oleh perusahaan, antara lain:

a) *Secured and unsecured bonds*

Obligasi yang memiliki aset tertentu dari penerbit yang dijadikan jaminan.

b) *Convertible and callable bonds*

Obligasi yang mengizinkan pemegang obligasi untuk mengubahnya menjadi saham biasa dengan opsi pemegang obligasi.

Jurnal terkait *bonds payable* adalah sebagai berikut:

<i>Cash</i>	xxx
<i>Bonds payable</i>	xxx

2) *Long-term notes payable* (Utang wesel jangka panjang)

Utang wesel merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Utang wesel jangka panjang ini memiliki tanggal jatuh tempo yang lebih dari satu tahun.”

Jurnal terkait *bonds payable* adalah sebagai berikut:

<i>Cash</i>	xxx
<i>Notes payable</i>	xxx

“Menurut Weygandt, *et al.* (2019), *The ownership claim on a company’s total assets is equity.*” Jika diartikan, “ekuitas adalah klaim kepemilikan atas total aset perusahaan.” “Menurut Kieso, *et al.* (2018), ekuitas terdiri dari:

1) *Share Capital*, yaitu nilai saham yang diterbitkan.

Cash	xxx
Share capital ordinary	xxx

2) *Share Premium*, yaitu jumlah tambahan dana yang melebihi nilai nominal.

Cash	xxx
Share premium ordinary	xxx
Share capital ordinary	xxx

3) *Preference Shares*, yaitu saham yang didahulukan untuk dividen dan hasil likuidasi.

Cash	xxx
Share capital preference	xxx

4) *Retained Earnings* (laba ditahan), yaitu laba yang tidak diatribusikan.

Income summary	xxx
Retained earnings	xxx

5) *Accumulated Other Comprehensive Income (AOCI)*, yaitu jumlah agregat dari pendapatan komprehensif lainnya.

Unrealized gain or loss - equity	xxx
Accumulated other comprehensive income	xxx

6) *Treasury Shares*, yaitu nilai saham yang ditarik kembali oleh perusahaan.

Treasury shares	xxx
Cash	xxx

7) *Non-Controlling Interest (Minority Interest)*, yaitu sebagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan laporan.”

## 2.9 Pengaruh Solvabilitas terhadap Opini Audit *Going Concern*

“Menurut Haryanto dan Sudarno (2019), *DER* merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang terhadap modal. Dengan menilai kondisi keuangan ini dapat mengklasifikasikan perusahaan dalam keadaan baik atau tidak. Auditor akan melihat sisi ini bagaimana pendanaan perusahaan lebih banyak dari hutang atau modal. Hutang didapat dari kreditur, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Teori *Stakeholder* perusahaan meminjam dana pada kreditur maka perusahaan memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melunasi hutang tersebut. Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka kewajiban perusahaan untuk mengembalikan dana juga semakin tinggi dan perusahaan harus melunasi hutang. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghasilkan laba untuk membayar hutang sedangkan beban operasional tetap berjalan.” Dapat disimpulkan bahwa semakin besar rasio *DER*, maka semakin besar kemungkinan auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Simanjuntak, Hutasoit, Simamora, dan Hayati (2020) menemukan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Putranto (2018) menemukan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penjelasan mengenai rasio solvabilitas yang diukur dengan *DER* dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**“Ha<sub>2</sub>: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.”**

## 2.10 *Disclosure*

“Menurut Kusumayanti dan Widhiyani (2017), *disclosure* merupakan pengungkapan dalam laporan keuangan baik hal tersebut merupakan informasi positif maupun negatif yang nantinya akan berpengaruh pada keputusan investasi.” “Menurut Mariana,

Kuncoro, dan Ryando (2018) *disclosure* adalah pengungkapan atau penjelasan, pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif yang mungkin berpengaruh atas suatu keputusan investasi. *Disclosure* dibutuhkan oleh para pengguna untuk lebih memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan pihak pengguna untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan (*disclosure level*) dari laporan keuangan yang bersangkutan. Informasi yang relevan tentang posisi keuangan perusahaan sangat dibutuhkan oleh investor. Dengan adanya pengungkapan atau penjelasan informasi tersebut diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan”. “Menurut Almilia dan Retrinasari (2007) dalam Mariana, Kuncoro, dan Ryando (2018), pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. Perusahaan diharapkan untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan.”

“Menurut Hendriksen dan Brenda (2002) dalam Saputra dan Kustina (2018), terdapat 3 konsep pengungkapan, yaitu:

1) *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup)

Konsep ini digunakan untuk pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2) *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)

Tujuan etis adalah agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3) *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)

Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Bagi beberapa pihak

pengungkapan secara penuh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan.”

“Menurut Hidayat (2017), terdapat 2 jenis informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan yang terdiri dari:

1) *Mandatory Disclosure* (Pengungkapan Wajib)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Untuk perusahaan yang *go public* pengungkapan yang wajib ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

2) *Voluntary Disclosure* (Pengungkapan Sukarela)

Pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan melebihi pengungkapan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.”

“Menurut Fitriani dan Dharma (2007) dalam Saputra dan Kustina (2018), variabel ini diukur dengan menggunakan indeks yang telah diatur dalam Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Indeks *Disclosure* dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Indeks *Disclosure***

No	Keterangan
1	Ikhtisar data keuangan penting
2	Informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan
3	Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan
4	Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi
5	Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan

6	Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha
7	Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan perusahaan
8	Nama dan alamat perusahaan
9	Riwayat singkat perusahaan
10	Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan
11	Struktur organisasi dalam bentuk bagan
12	Visi dan misi perusahaan
13	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris
14	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota direksi
15	Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan)
16	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya
17	Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perubahan tersebut
18	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa efek dimana saham perusahaan dicatatkan
19	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal
20	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional
21	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor Perwakilan
22	Tinjauan operasi per segmen usaha
23	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya
24	Prospek usaha dari perusahaan

25	Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar
26	Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen
27	Tata kelola perusahaan (Corporate Governance)
28	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan
29	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
30	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
31	Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan
32	Ringkasan statistik keuangan untuk 3 – 5 tahun
33	Informasi tentang penelitian dan pengembangan”

Sumber: Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-134/BL/2006

“Menurut Kartika (2012) dalam Mariana, Kuncoro, dan Ryando (2018), penentuan indeks dilakukan dengan menggunakan skor *disclosure* yang diungkapkan oleh perusahaan. Jika perusahaan mengungkapkan item informasi dalam laporan keuangannya, maka skor 1 akan diberikan dan jika *item* tersebut tidak diungkapkan, maka skor 0 akan diberikan.” “Menurut Hossain (2008) dalam Kusumayanti dan Widhiyani (2017), rumus yang digunakan dalam menentukan *disclosure level* adalah sebagai berikut:

$$Disclosure\ Level = \frac{\text{Jumlah skor } disclosure \text{ yang terpenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \quad (2.3)$$

Sumber: Kusumayanti dan Widhiyani (2017)”

### 2.11 Pengaruh *Disclosure* terhadap Opini Audit *Going Concern*

“Menurut Septiana dan Diana (2019), pengungkapan informasi yang semakin lengkap, akan memudahkan auditor dalam mendapatkan informasi yang digunakan untuk menilai risiko perusahaan terutama pada perusahaan dengan kinerja yang kurang baik.

Semakin mudah auditor untuk menilai risiko perusahaan, maka auditor juga akan lebih mudah untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan sehingga memperbesar pemberian opini audit going concern.”

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mariana, Kuncoro, dan Ryando (2018) menemukan bahwa *disclosure level* berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Sulistyowati (2020) menemukan bahwa *disclosure level* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penjelasan mengenai disclosure dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit going concern, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**“Ha<sub>3</sub>: Disclosure berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern.”**

## **2.12 Ukuran Perusahaan**

“Menurut Nugroho, Nurrohmah, dan Anasta (2018), ukuran perusahaan adalah gambaran dari suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar atau kecil yang dapat dilihat melalui total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar.”

“Menurut Kristiana (2012) dalam Kusumaningrum dan Zulaikha (2019), jika penjualan, total aset dan kapitalisasi pasar semakin besar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut.” “Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, di dalam Pasal 1 termuat penjelasan tentang pengkategorian emiten:

1) Emiten Skala Kecil adalah emiten dengan aset skala kecil tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),

- 2) Emiten Skala Menengah adalah emiten dengan aset skala menengah yang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah),
- 3) Emiten Skala Besar adalah emiten dengan aset skala besar yang lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”

Menurut Darya (2017) dalam Minerva, *et al.* (2020), variabel ini diukur dengan menggunakan indikator natural logaritma total aset, dengan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Ln (Total Aset): logaritma natural dari total aset perusahaan pada periode t laporan keuangan.

“Menurut Weygant, *et al.* (2019), aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu bisnis atau kapasitas untuk menyediakan pelayanan atau manfaat masa depan”. Dalam menghitung *size*, digunakan logaritma natural dari total aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi nilai dari total aset perusahaan yang sebenarnya. “Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang penyajian laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), aset digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Aset lancar

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- a) Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset/memiliki intensi untuk menjual/menggunakannya dalam siklus operasi normal
- b) Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan
- c) Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jk waktu 12 bulan setelah periode pelaporan
- d) Aset merupakan kas/setara kas

## 2) Aset tidak lancar

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar. Istilah “tidak lancar” untuk mencakup aset tetap, aset tak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang.” Contoh dari aset tidak lancar adalah:

### 1) Investasi jangka panjang (*long-term investments*)

*Long-term investments* adalah investasi yang tidak dapat dipasarkan atau manajemen tidak berniat untuk mengubahnya menjadi uang tunai dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi yang lebih lama.

	<i>Investment property</i>	xxx
	<i>Cash</i>	xxx

### 2) Properti, pabrik, dan peralatan (*property, plant, and equipment*)

*Property, plant, equipment* adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan untuk kebutuhan operasi dalam bisnis seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Perusahaan biasanya menggunakan tanah (*land*) sebagai lokasi pembuatan pabrik atau gedung perkantoran. Gedung (*building*) merupakan fasilitas yang digunakan dalam operasional perusahaan, seperti toko, kantor, pabrik. Peralatan (*equipment*) merupakan aset yang digunakan dalam kegiatan operasi, seperti perabot kantor, mesin, truk pengiriman.

	<i>Land/Building/Equipment</i>	xxx
	<i>Cash</i>	xxx

### 3) Aset lainnya (*other assets*)

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Contoh dari aset lainnya adalah aset berwujud yang dimiliki untuk dijual dan piutang jangka panjang.

	<i>Other financial asset</i>	xxx
	<i>Cash</i>	xxx

4) Aset tak berwujud (*intangible assets*)

*Intangible assets* merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrumen keuangan. Contoh dari *intangible assets* yaitu:

a) *Patent*

Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, yang memungkinkan penemu (investor) untuk mengendalikan penciptaan (perakitan), penjualan, atau penggunaan hasil temuannya.

<i>Patent</i>	xxx
<i>Cash</i>	xxx

b) *Trademark*

Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, yang mengizinkan penggunaan simbol (lambang logo), label (nama) atau slogan, dan pola atau bentuk (design) tertentu, yang membedakan sebuah produk atau jasa dari produk atau jasa lainnya yang serupa.

<i>Trademark</i>	xxx
<i>Cash</i>	xxx

c) *Copyrights*

Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, yang memperbolehkan pengarang atau penulis untuk menerbitkan, menjual, dan mengendalikan hasil tulisan, artistik, atau karangan musik.

<i>Copyrights</i>	xxx
<i>Cash</i>	xxx

d) *Franchise*

Merupakan hak eksklusif yang diterima oleh perusahaan atau perorangan untuk menjalankan fungsi tertentu atau menjual produk atau jasa tertentu.

<i>Franchise</i>	xxx
<i>Cash</i>	xxx

e) *Customer list*

Merupakan sebuah daftar atau database yang berisi informasi mengenai pelanggan (konsumen), seperti nama, alamat, catatan atau track record pembelian pada masa lalu, dan seterusnya.

	<i>Customer list</i>	xxx
	<i>Cash</i>	xxx

f) *Goodwill*

Merupakan sumberdaya, faktor, dan kondisi yang tidak berwujud lainnya, yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan di atas normal.”

	<i>Goodwill</i>	xxx
	<i>Cash</i>	xxx

### 2.13 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*

“Menurut Mutchler J. (1985) dalam Minerva, *et al.* (2020), mengungkapkan auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan kecil dibandingkan pada perusahaan besar.” “Menurut Alicia (2013) dalam Minerva, *et al.* (2020), perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan besar.” “Menurut Vermeer, *et al.* (2013) dalam Nugroho, *et al.* (2018), semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dianggap memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan usahanya sehingga terdapat peluang besar tidak menerima opini audit *going concern*. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil perusahaan akan memperbesar kemungkinan pemberian opini *going concern*.”

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akbar dan Ridwan (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santosa (2007) dalam

Minerva, Sumeisey, Stefani, Wijaya, dan Lim (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penjelasan mengenai disclosure dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

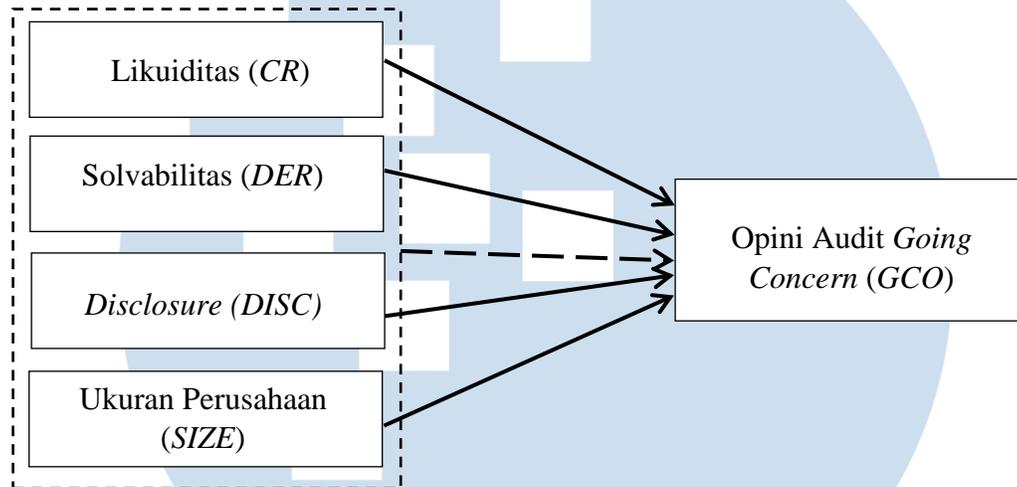
**“Ha<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.”**

#### **2.14 Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, *Disclosure*, dan Ukuran Perusahaan secara Simultan terhadap Opini Audit *Going Concern***

Penelitian Miraningtyas dan Yudowati (2019) menunjukkan bahwa “variabel likuiditas, reputasi auditor dan *disclosure* berpengaruh secara simultan terhadap opini audit *going concern*.” Penelitian Minerva *et al.* (2020) menunjukkan bahwa “variabel kualitas audit, debt ratio, ukuran perusahaan, dan audit lag berpengaruh secara simultan terhadap opini audit *going concern*.” Penelitian Abadi, Purba, dan Fauzia (2019) menunjukkan bahwa “variabel *liquidity ratio*, *leverage ratio*, *company size*, dan *audit quality* berpengaruh secara bersama-sama terhadap opini audit *going concern*.”

## 2.15 Model Penelitian

Model penelitian yang dapat digambarkan dari penelitian ini adalah:



Gambar 2. 1 Model Penelitian

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA